

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya Agama Islam diturunkan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan, yang salah satu dari penjabaran tersebut adalah untuk memelihara keturunan. Dengan pernikahan diharapkan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan gejolak nafsu yang tak terkendali, sehingga dapat memelihara diri dari perbuatan zina.

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan sekedar pada kebutuhan biologis semata dan bukan sekedar tertib administrasi. Pernikahan adalah suatu ibadah dan berarti pelaksanaan perintah syar'i, sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada Khaliknya.¹ Dalam hal ini, Allah SWT. memberikan harapan masa depan yang prospektif bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Cet.I*, CV. Pustaka Setia, Bandung: 2009, hlm,

*miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²

Allah SWT melarang zina dan hal-hal yang menyebabkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Yakni memandang kepada wanita, bergaul dengan mereka, membuka aurat, menampakkan perhiasan, masuk rumah tanpa izin dan lain sebagainya, keboborokan moral dan jatuh kepada jurang kebinasaan.

Kemudian, dalam ayat tersebut di atas Allah SWT menganjurkan nikah dan memerintahkan menolong dan memudahkan jalanya. Karena nikah adalah kebaikan yang akan membuktikan terpeliharanya kehormatan serta dapat menghindarkan orang mukmin dari perbuatan zina dan menjauhkan dosa-dosa. Bahkan nikah merupakan jalan satu-satunya untuk melestarikan manusia dan menciptakan suatu masyarakat yang mulia.³ Oleh karenanya, ayat-ayat ini memerintahkan agar para pemuda pemudi memelihara kehormatannya dengan cara menikah, serta mendorong supaya supaya tidak begitutakut terhadap resiko perkawinan baik yang bersifat ekonomi maupun lainnya.

Selain firman Allah SWT. di atas, dalam hadits Shahih Bukhari Muslim menyebutkan :

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يامعشر الشباب, من استطاع منكم الباءة

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kudus: PT. Menara Kudus, 2006, hal. 354

³ Syaikh Muhammad Ali Ash Shabun, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Huku*, CV. Asy Syifa' Semarang 1994, hlm 313.

فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجاء" (متفق عليه)⁴

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, Dia menceritakan, kami pernah bepergian bersama rasulullah yang pada saat itu kami masih muda dan belum mempunyai kemampuan apapun. maka beliau bersabda: " wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaklah ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. dan barang siapa yang belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat meredam(syahwat)."

Hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mampu (secara fisik dan psikis) menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahat yang agung.⁵ Dan pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.⁶

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti mereka tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam

⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, *Bulughul Al-Maram*, CV. Nurul Huda, Surabaya, hal 200

⁵ Mustofa Al Bagho', *Syarh At-tadzhib*, Daar Syariah Islamiyah, Singapura, hal. 157

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 6 (penerbit PT Al-Ma'arif Bandung), hal.8.

pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Perkawinan tersebut mengandung perjanjian yang suci dan agung yang merupakan modal dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang mendapatkan ridha dari Allah SWT serta bermanfaat bagi agama bangsa dan negara.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Undang-undang perkawinan Indonesia menetapkan bahwa seorang yang belum mencapai umur 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orang tua, atau salah seorang (orang tua) yang masih ada, atau dari wali yang memelihara (kalau kedua orang tua sudah meninggal). Izin itu dapat diberikan mereka jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun.⁷ Dalam hal penyimpangan umur tersebut atau dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk melakukan perkawinan dapat dimintakan dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

⁷ Dr. Peunoh Daly, 2005, *Hukum Pekawinan Islam*, suatu studi perbandingan dalam kalangan ahlu-sunnah dan ngara-negara Islam, bulan bintang, hal. 132

Di Pengadilan Agama Kudus banyak menerima permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh orangtua/ Pemohon terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Diantaranya perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds. dan Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Kds. yang pertama umur calon mempelai wanita 15 tahun 9 bulan sedangkan yang kedua calon mempelai wanita umur 14 tahun 2 bulan kedua-duanya calon mempelai sedang dalam keadaan hamil di luar nikah.

Beberapa hal yang mendasari adanya permohonan dikarnakan adanya hubungan yang sangat akrab sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh syara' yaitu perzinahan bahkan sampai dengan terjadi kehamilan akaibat perbuatan tersebut. Apabila hubungan tersebut tidak segera dikawinkan maka akan merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga terutama keluarga si gadis sehingga orang tua dari gadis sangat berkeinginan untuk mengawinkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda.

Image yang melekat dimasyarakat diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya di usia berapapun. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya menikah semakin ringan beban orang tua. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban penderitaan orang tua akan pergunjungan masyarakat disekitarnya.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) dinyatakan “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilasan) tahun dan pihak wanita sudahy mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin kedua perkara tersebut di atas masing-masing berbeda atau terjadi adanya “disparitas” (perbedaan) dalam jenis perkara yang sama sehingga menjadi pertanyaan apa dan bagaimana Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap kedua perkara tersebut di atas yang putusan/ penetapanya berbeda .

Adanya Upaya pencegahan perkawinan dini sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974 untuk batas usia kawin bagi wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun telah dianulir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 18 Mei 2017 dan telah diputus pada tanggal 13 Desember 2018 yang amar putusan sebagai berikut :⁸

1. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang Frasa “usia 16 (enam belas) tahun “ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat ayat (1) sepanjang Frasa “ usia 16 (enam belas) tahun “ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018.

perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini dan

3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁹. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah berpendapat Pasal 7 ayat (1) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 sepanjang Frasa “usia 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan dan itu dengan tidak terkecuali “.

Putusan Mahkamah konstitusi tersebut diatas menunjukan terhadap batas usia calon mempelai wanita yang telah genap berumur 16 tahun masih belum dianggap cukup dan diskriminatif sehingga harus disejajarkan dengan batas usia calon mempelai laki-laki yaitu genap berusia 19 tahun.

Implikasi penetapan dispensasi kawin dalam prespektif perkawinan usia dini dari sisi hukum dan dampak lain diperlukan sebuah kajian yang komprehensif dan mendasar untuk mendapatkan kejelasan hukum baik hukum positif maupun hukum agama begitu juga terhadap dampak yang menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi akan sangat dimungkinkan

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018.

terjadi permasalahan yang ujung-ujunga dimungkinkan terjadinya *distorsi* (goncangan) dalam rumah tangga .

Permohonan dispensasi kawin usia dini cukup tinggi , yaitu sekitar 58 kasus selama tahun 2016, 64 kasus selama tahun 2017 dan 54 kasus per bulan September 2018. Hal ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius antara pemerintah , lembaga terkait, masyarakat serta para orangtua.. Sebagaimana banyak permohonan dispensasi kawin dikarenakan calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu akibat hubungan bebas yang dilakukannya. sehingga penting adanya penelitian tentang penetapan dispensasi kawin, supaya tidak meuncur asumsi bahwa mereka bebas melakukan hubungan suami-istri di luar nikah karena sangat mudah untuk mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan apabila terjadi kehamilan.

Dalam hal kasus dispensasi perkawinan, peraturan perundang-undangan tidak memberikan kriteria khusus sebagai dasar pertimbangan bagi majelis Hakim untuk menolak atau menerima permohonan para pemohon. Sementara itu , pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan tegas melarang Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁰

¹⁰ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (yogyakarta; FH UII Press, 2007), hlm, 184.

B. Perumusan Permasalahan

Rumusan masalah menjadi hal yang sangat mendasar didalam menentukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan membantu mengarahkan penelitian yang akan dibahas nantinya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimanakah disparitas pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin pada pengadilan Agama Kudus ?.
2. Bagaimana implikasi penetapan dispensasi kawin terhadap perkawinan usia dini ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusah masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis dispartitas pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin usia dini pada Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk memahami dan menganalisis implikasi penetapan dispensasi kawin terhadap perkawinan usia dini .

D. Metode -Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Hukum Normatif (*yuridis normatif*) meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk mengidentifikasi konsep

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan dengan menggunakan dua pendekatan :

- 1). Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*).
- 2). Pendekatan Konsep (*conseptual Approach*) dalam memahami konsep / filosofis melalui Istimbath Hukum (penemuan hukum) .diantara nya “*Maslahah Mursalah*”.

Dalam Konteks ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini pada Pengadilan Agama Kudus. Terkait dengan penelitian ini, maka ada dua jenis data yang digunakan ya’ni :

- a) Data primer (primery data) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen/ penetapan, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang disediakan di perpustakaan / Arsip .
- b) Data Sekunder (secondary data) Data sekunder mencakup bahan hukum primer (Al-Qur’an. Hadits, fiqih Undang-undang terkait) .bahan hukum sekunder (tafsir Al-Qur’an, buku-buku , hasil peneilitian dll) dan
- c) Bahan hukum tertier (kamus-kamus dan Kamus hukum).